

TINJAUAN PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PENYUSUN DAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERUBAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

Ditia Rizki Amalia, S.AP¹, Afrianti, S.E., M.Pd², Helmi Edisa, S.E., M.M³
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

ditiariziamalia@gmail.com

Afriyantifebri75@gmail.com

Helmiedisa00@gmail.com

ABSTRACT

DITIA RIZKI AMALIA. NPM 1810078201045. Review of Differences in Perceptions between Compilers and Users of Financial Statements in the Regions in the Changes of the Accrual-Based Government Accounting System in Kerinci Regency. This research took place in Kerinci Regency with the formulation of the problem is how the differences in perception between composers and users of Financial Statements in the Regions in the context of Changes in the Accrual-Based Government Accounting System in Kerinci Regency. This study used a qualitative approach where the data were obtained by interviewing 8 informants in Kerinci Regency, then analyzing the data with data triangulation so that accurate information was obtained. The conclusion of this study is that there are differences in the perceptions of Compilers and Users regarding the application of Accrual-Based Accounting, compilers understand better in terms of compliance with the regulations, while for users to understand accrual basic in terms of usefulness of information from the reports produced. To achieve the success of implementing Accrual-Based Accounting, it is necessary taking steps, among others, by equalizing perceptions of implementation and preparing competent human resources in order to obtain high mastery and maximum success.

Keywords: Perception, Financial Statements, Changes in Accounting Systems, Accrual Based

ABSTRAK

DITIA RIZKI AMALIA. NPM 1810078201045. Tinjauan Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah Bagaimana Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Kerinci. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dengan wawancara di Kabupaten Kerinci kepada 8 orang informan yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi Penyusun dan Pengguna mengenai penerapan Akuntansi Berbasis Akrual penyusun lebih memahami dari sisi ketaatan terhadap peraturannya, sedangkan bagi pengguna memahami akrual basic dari sisi kemanfaatan informasi dari laporan yang dihasilkan. Untuk mencapai keberhasilan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, maka perlu mengambil langkah Antara lain dengan cara menyamakan persepsi pelaksanaan dan mempersiapkan SDM yang berkompeten agar diperoleh penguasaan yang tinggi serta keberhasilan yang maksimal.

Kata Kunci : Persepsi, Laporan Keuangan, Perubahan Sistem Akuntansi, Berbasis Akrual

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem akuntansi khususnya pada sektor publik terus berkembang, hal yang terjadi pada sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara (Inessa Trihani: 2018). Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP). Seiring dengan terbitnya paket Undang Undang Keuangan Negara (UUKN) UU No 17 tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, dan UU No 15 tahun 2004 dan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (Boris Prayono dan Sutaryo 143 :2007).

Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan dituangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi sektor publik, dan yang terbaru tinjauan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan di pusat maupun di daerah ditandai dengan dikeluarkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Study Nomor 14 IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional. Kekurangan dari akuntansi berbasis kas dapat ditutupi oleh akuntansi berbasis akrual yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Kajian dari Deloitte menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan.
2. Meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Deloitte, 2004 menyatakan bahwa informasi keuangan yang Tinjauan Perbedaan Persepsi Antara Penyusun Dan Pengguna Laporan Keuangan Di Daerah Dalam Rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Pemkab Kerinci) disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakai untuk :

- a. Membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumberdaya.
- b. Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah.

- c. Melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- d. Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah.
- e. Memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya..

Namun akuntansi berbasis akrual mempunyai kendala pada kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana teknologi informasi dalam penerapannya.

Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten kerinci Sejak tahun 2012 telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi berbasis ini, penggunaan sistem yang terkoneksi ini, dimulai dari menyusun anggaran sampai dengan pertanggung-jawaban pelaksanaan, sehingga masing-masing SKPD dapat lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan.

Melihat dari fenomena ini maka setidaknya Kabupaten kerinci telah memiliki kesiapan dari segi teknologi informasi untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Simanjuntak dalam Ardiansyah ,2012). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri yang merupakan penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi (hardware dan software) yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2010) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya computer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan informasi yang berkualitas.

Perubahan pengelolaan keuangan negara yang lebih akrual dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selain ketiga faktor di atas juga diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Komunikasi harus dilakukan baik dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal, sehingga penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan di daerah dalam rangka perubahan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual (studi kasus pada pemkab kerinci)”.

Tinjauan Pustaka

Persepsi

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.

Penyusun Laporan Keuangan

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD, Selanjutnya, Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Pengguna Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Entitas Laporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas (1) Pemerintah Pusat (2) Pemerintah Daerah (3) Satuan Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah (4) Organisasi lainnya, Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Pengguna Laporan keuangan di bagi menjadi dua yaitu pengguna internal dan eksternal.

Akuntansi Berbasis Akrual

akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di manahak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakuipada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima ataudibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yangtidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan pengguna laporan keuangan di daerah dalam rangka perubahan sistem akutasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2003 : 91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bungin, 2003 : 53). Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang bermula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel (Sugiono, 2001 : 61).

Disamping itu pemilihan informan dipilih sesuai dengan prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu : Prinsip Kesesuaian, Jumlah infroman dan Prinsip kecukupan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta buku-buku lainnya yang peneliti anggap perlu dan berhubungan dengan pokok masalah yang peneliti bahas.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara :

- a. *Wawancara*
- b. *Studi dokumentasi*
- c. *Triangulasi*

Unit Analisis

Menurut Sugiono (2012 : 02), unit analisis adalah satuan subjek yang akan di analisis, dalam penelitian ini subjeknya adalah di Pemerintah Kabupaten Kerinci, atau yang ada kaitannya dengan objek, yaitu PPK- SKPD, PEMDA, dan DPRD yang menyusun dan menggunakan laporan keuangan berbasis akrual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusun Laporan Keuangan

Pendapat BPKPD sebagai Penyusun laporan keuangan berpendapat bahwa dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Kerinci karena digunakan secara otomatis lebih transparan, dan dengan diterapkan akuntansi berbasis akrual dan dijalkannya aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam struktur pemerintahan ataupun tuntutan pengelolaan laporan keuangan untuk lebih profesional.

2. Pengguna Internal

Seluruh SKPD sebagai Pengguna Laporan Keuangan Kabupaten Kerinci. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya pada beberapa SKPD saja, berikut ini merupakan Pendapat dari Inspektorat, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas BKPSDMD sebagai pengguna internal mengenai akuntansi berbasis akrual adalah pentingnya akuntansi berbasis kualitas informasi laporan keuangan yang bisa dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dan mudah dalam pengaplikasiannya dan lebih mudah dalam pengawasan laporan keuangan karena sudah menggunakan aplikasi dan proses pencatatan belanja bisa di catat langsung.

3. Pengguna Eksternal

Sekretariat DPRD sebagai pengguna eksternal mengenai akuntansi berbasis akrual dengan adanya akuntansi berbasis akrual mempermudah pelaporan keuangan, akuntansi berbasis akrual pendapatan dan pengeluaran dicatat segera setelah layanan atau produk

digunakan, ketepatan waktu akuntansi berbasis akrual lebih akurat memberikan gambaran tentang laporan keuangan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini adalah :

Tinjauan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan di daerah dalam rangka perubahan system akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten kerinci diantaranya (INSPEKTORAT, BPKPD, SEKDA, DPRD, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL DAN DINAS BKPSDMD) telah berjalan dengan sangat baik. Dari Uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

Sementara itu dari sisi pengguna penerapan akrual basic dipersepsikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dan kemudian dilaksanakan oleh para pengelola, karena harapan para pengguna adalah diperolehnya informasi keuangan yang memadai dan berkualitas dari penyelenggaraan akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut.

Dari sisi penyusun atau pengelola serta dari sisi pengguna didapatkan persepsi pemahaman yang berbeda, dikarenakan kepentingan yang berbeda pula. Namun demikian perbedaan tersebut bukanlah kendala dan factor utama tidak terlaksanakannya akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Dari Pendapat dari masing-masing SKPD dapat di tarik kesimpulan Bahwa sudut pandang dari pengelola dan penyusun, para pejabat daerah selaku pengguna anggaran dan para SKPD selaku pelaku anggaran pada setiap periode dituntut untuk menyajikan pelaporan keuangan secara akrual. Namun demikian persepsi mengenai penerapan akrual basic pada akuntansi pemerintahannya masih semata-mata dilaksanakan karena factor pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan bukan karena kebutuhan maupun kepentingan professional.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini dan LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldiani, Sulani. 2010. "Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu". *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (Online)*. <http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-12.html>.
- Alex, Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia
- Ahmadi, A. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1988. *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*. Seri

- psikologi. Yogyakarta: Liberty.
- Bimo, Walgito (2010), *Pengantar Psikologi umum*. Yogyakarta: C.v Andi
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman filosofis dan metodologis kea rah penguasaan model aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta ; PT. Indeks.
- Deloitte, 2004. *Mastering the transformation : New Public Management. Accrual Accounting, and Budgetin : Public Sector Paper*
- Dedi Nordiawan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat.
Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta.
(<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 April 2012.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Federation of Accountants (IFAC), Public Sector Commite. 2003, *Study 14, Transition to the Accrual Basis Of Accounting : Guidance For Governments and Government entities (Second edition)*,
- Miles dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku sumber tentang Metode-metode baru.
- Norman K Denkin. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif (online),(<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 17 November 2018).
- Simanjuntak, Binsar H. (2005). *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. 1(1), 23-35.
- Sinaga. Hardian Hariono. 2010. *Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi Terhadap Return Saham*.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bandung*: Alfabeta.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bandung*: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Walgito Bimo,1990, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta, Andi
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003
- Undang-Undang tentang Pembendaharaan Negara, UU. No.1 Tahun 2004.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*.